

BAB II

SITUASI DAN KONDISI ACEH SEBELUM DIBERLAKUKANNYA DAERAH OPERASI MILITER (1989-1998)

A. Kondisi Geografis Aceh

Provinsi Daerah Istimewa Aceh disebut sebagai salah satu daerah istimewa didasarkan pada putusan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Keputusan Wakil Perdana Menteri I pada tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan status Provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh.¹ Provinsi Daerah Istimewa Aceh terletak di ujung Barat pulau Sumatra dengan Ibukota di Banda Aceh. Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah nama menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 9 Agustus 2001.²

Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi paling barat di Indonesia, daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.³ Secara geografis dari arah barat laut ke

¹ Berdasarkan keputusan itu, Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki tiga keistimewaan yang diakui oleh undang-undang, yaitu di bidang agama, pendidikan, dan adat istiadat. Lihat Muhammad Gade Ismail, (dkk). *Tantangan dan Rongrongan terhadap Keutuhan dan Kesatuan Bangsa: Kasus Darul Islam di Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sejarah dan nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1994, hlm. 7.

² Bambang Soeprianto, (dkk). *Menuju Aceh Baru Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta: Lembaga Informasi Nasional, 2001, hlm. 1.

³ Peta Aceh dapat dilihat pada Lampiran 1, hlm. 98.

tenggara terletak pada posisi 2°-6° Lintang Utara dan 95°-98° Bujur Timur.⁴ Letak geografis daerah Istimewa Aceh strategis karena merupakan pintu gerbang sebelah barat Kepulauan Indonesia. Di samping itu, karena sebagian wilayahnya di pantai utara terletak di Selat Malaka, maka daerah ini penting pula dipandang dari sudut lalu lintas internasional sejak permulaan tarikh Masehi.⁵

Berdasarkan posisi geografis tampak bahwa provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki wilayah yang strategis dari segi perekonomian.⁶ Semua kapal yang akan menuju Samudra Hindia akan melalui selat Malaka, oleh karena itu, tidak mengherankan Aceh menjadi daerah terbuka dan menjadi tempat persinggahan kapal-kapal berbagai bangsa dalam aktivitas perdagangan. Selain itu, Aceh telah menjalin kerjasama perdagangan dengan berbagai daerah di Semenanjung Malaya dan India.⁷

Luas wilayah Nanggroe Aceh Darussalam yaitu 57.365,57 km² atau 2,88% dari luas Indonesia. Daerah ini terdiri atas 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai.⁸ Bagian tengah wilayah Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bentangan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini memanjang mulai dari Banda Aceh hingga Aceh Tenggara. Dalam rangkaian

⁴ Agus Budi Wibowo. *Tueng Bila dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Nasional, 2009, hlm. 28.

⁵ Muhammad Gade Ismail, (dkk)., *loc.cit.*

⁶ Peta jalur perdagangan Aceh dapat dilihat pada Lampiran 2, hlm. 99.

⁷ Agus Budi Wibowo, *op.cit.*, hlm. 29.

⁸ Moh. Soleh Isre. *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 103.

pegunungan Bukit Barisan terdapat beberapa gunung yang cukup terkenal diantaranya Gunung Seulawah Agam dan Gunung Leuser. Gunung ini adalah gunung tertinggi yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁹

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak di bagian ujung gugusan kepulauan Nusantara menduduki posisi penting sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan belahan dunia Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau.¹⁰ Kontak perdagangan orang Aceh dengan bangsa asing sudah dimulai semenjak tumbuhnya peradaban di Nusantara. Hubungan antar bangsa yang dibina pada awal perkembangan manusia melalui perdagangan. Perkembangan interaksi dan perdagangan antar bangsa pada awal peradaban Yunani, menandakan peradaban Aceh sudah mulai berkiprah walaupun tak sebanding dengan peradaban Yunani pada waktu itu.¹¹ Banyak saudagar dari Arab dan India mencari rempah-rempah dari Sumatra untuk dibawa melalui India yang selanjutnya diteruskan ke Timur Tengah.

Selat Malaka merupakan jalan penting dalam gerak migrasi bangsa-bangsa di Asia, dalam gerakan ekspansi kebudayaan India dan sebagai jalan niaga dunia. Selat Malaka adalah jalan penghubung utama antara dua pusat kebudayaan Cina dan India.¹² Oleh karena itu, wilayah sekitar Malaka selalu

⁹ Agus Budi Wibowo, *op.cit.*, hlm. 32.

¹⁰ Bambang Soeprianto, (dkk)., *loc.cit.*

¹¹ Abdul Rani Usman. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 8.

¹² Muhammad Gade Ismail, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 8.

mempunyai arti penting sepanjang gerak sejarah Indonesia. Muncul dan perkembangannya pusat-pusat kekuasaan di kawasan ini semenjak masa pengaruh Hindu dan Islam berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan di sekitar Selat Malaka.

Aceh yang sekarang ini pada awalnya terpisah-pisah oleh kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Sebelum Aceh lahir sebagai kerajaan Islam, ada enam kerajaan penting yang ada di sana, yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Teumiang, Kerajaan Pidie, Kerajaan Indera Purba, dan Kerajaan Indera Jaya. Keenam kerajaan tersebut dapat dipersatukan menjadi daerah Aceh oleh Sultan Husein Syah yang memerintah Aceh Darussalam pada 870-885 H (1465-1480 M).¹³ Pada Masa inilah kesatuan Aceh terbentuk menjadi satu nama, satu bangsa, dan satu negara. Kesatuan inilah yang membuat Aceh menjadi kuat dan megah hingga mencapai zaman gemilangnya.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Aceh

Suku bangsa Aceh merupakan salah satu suku bangsa yang tergolong ke dalam etnik Melayu atau ras Melayu. Etnik Aceh sering diidentikkan dengan Arab, Cina, Eropa, dan India. Melihat dari segi fisik, bentuk muka orang Aceh

¹³ Hasanuddin Yusuf Adan. *Sejarah Aceh dan Tsunami*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2005, hlm. 18.

cenderung mirip dengan orang Arab atau India.¹⁴ Ureueng Aceh merupakan salah satu sub etnis yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah penduduk terbanyak.¹⁵

Aceh sejak dulu telah mempunyai kontak dagang dengan bangsa asing terutama India, Timur Tengah dan Cina. Realitas tersebut karena letaknya yang strategis dengan jalur pelayaran internasional serta berdekatan dengan lautan India dan selat Malaka. Keberadaan suku bangsa Aceh di ujung Pulau Sumatra menjadi perhatian para saudagar yang menggunakan laut sebagai jalan sekaligus mengakibatkan terjadinya kontak budaya antara bangsa-bangsa yang singgah di Aceh. Kehadiran para saudagar tersebut sekaligus mengakibatkan terjadinya kontak budaya antara bangsa-bangsa yang singgah di Aceh.

Kehadiran para saudagar tersebut di Aceh dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga pada waktu tertentu para pendatang tersebut menetap di Aceh. Imigran yang datang ke Aceh merupakan suku bangsa yang tidak berbeda dengan suku bangsa lainnya di Indonesia, terutama di Sumatra. Adanya kehidupan dan struktur masyarakat Aceh, maka diindikasikan sejarah kedatangan imigran ke Aceh terjadi ribuan tahun sebelum Masehi.¹⁶

¹⁴ Abdul Rani Usman, *op.cit.*, hlm 6.

¹⁵ Selain Ureueng di Nanggroe Aceh Darussalam terdapat pula tujuh sub etnis lain, yaitu Alas, Aneuk, Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, dan Tamiang. Kedelapan sub etnis tersebut mempunyai sejarah asal-usul dan budaya yang berbeda, tetapi kemudian kedelapan sub etnis tersebut lebih dikenal sebagai etnis Aceh. Lihat Agus Budi Wiboowo, *op.cit.*, hlm. 33.

¹⁶ Abdul Rani Usman, *op.cit.*, hlm. 6.

Begitu banyaknya bahasa yang berkembang di Aceh membuat bahasa Aceh sebelum Kerajaan Islam berkembang hanya digunakan sebagai bahasa lisan atau bahasa tutur keseharian.¹⁷ Sedangkan bahasa Melayu lebih banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan.¹⁸ Munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13 adalah salah satu gambaran awal diterimanya Islam sebagai landasan kehidupan kerajaan-kerajaan di Sumatra setelah pengaruh Hindu dan Budha lebih awal diterima dan hidup di wilayah tersebut.¹⁹

Saat Islam mulai berkembang, Kerajaan Aceh Darussalam memiliki suatu struktur masyarakat yang sempurna menurut ukuran waktu itu. Struktur kerajaan atau sistem lembaga masyarakat Aceh dapat membentuk suatu sistem masyarakat yang stabil dan menjadi lembaga yang dapat menjaga atau sebagai pengendalian sosial dalam masyarakat. Kehadiran lembaga tersebut sebagai lembaga pengontrol dan pengendali terhadap sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat Aceh.

Struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam ada lima, yaitu Gampong, Mukim, Nanggroe, Sagou, dan Kerajaan atau negara yang sekarang disebut sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Gampong sebagai suatu kesatuan

¹⁷ Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 1999, hlm. 15.

¹⁸ Setelah Kerajaan Samudra Pasai berkembang, bahasa Aceh mulai dipergunakan sebagai bahasa tulis terutama dalam penulisan hikayat dan cerita rakyat. Lihat Al-Chaidar, *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ Afadlal, (dkk). *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 53.

terdiri dari banyak masyarakat.²⁰ Beberapa Gampong-gampong tersebut dipimpin oleh seorang Mukim. Dalam struktur masyarakat Aceh, Mukim merupakan suatu pemimpin yang dapat menjaga dan mengayomi masyarakat, terutama tempat berkonsultasi serta tempat bertanya bagi masyarakat setempat.

Berbeda dengan Gampong, Nanggroe merupakan suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Uleebalang.²¹ Nanggroe mempunyai wilayah secara struktur dan hukum. Artinya Nanggroe merupakan wilayah-wilayah yang dikomandoi oleh Uleebalang namun kebijakan yang dicanangkan dan diputuskan oleh Uleebalang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Kerajaan Aceh, sedangkan Sagou yaitu federasi dari beberapa Nanggroe. Wilayah Sagou yang dipimpin oleh panglima Sangou hanya ada di Aceh Besar. Terakhir adalah kerajaan, yaitu sistem kenegaraan yang mempunyai wilayah undang-undang serta batas-batas wilayah. Kekuasaan Kerajaan Aceh mulai diujung barat Pulau Sumatra sampai ke Bengkulu dan Semenanjung Malaka.²²

²⁰ Gampong dalam masyarakat Aceh merupakan suatu sistem kemasyarakatan yang dapat mengatur diri sendiri sekaligus Gampong sebagai suatu kesatuan yang mengorganisasikan masyarakat yang berdomisili di lingkungan administrasi atau lingkungan hukum desa. Lihat Abdul Rani Usman, *op.cit.*, hlm. 47.

²¹ Uleebalang adalah kepala wilayah tertentu. Seorang Uleebalang berkedudukan tinggi pada zaman kerajaan. Para Uleebalang mempunyai hak otonom mengurus daerah-daerah dalam hal tertentu, asal tidak bertentangan dengan Kanun Al-Asyi atau undang-undang Nanggroe Aceh Darussalam. Lihat Abdul Rani Usman, *ibid.*, hlm. 49.

²² *Ibid.*, hlm. 50.

Salah satu ciri dari identitas Aceh adalah kuatnya hubungan antara raja, adat, dan ulama, serta pembagian kekuasaan yang terstruktur di antara ketiganya. Sistem kekuasaannya dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan adat-istiadat dalam kaidah Islam, karena itu pemimpin agama merupakan salah satu simbol utama dalam konfigurasi sosial budaya Aceh. Unsur adat dan agama merupakan dua unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak hidup masyarakat Aceh.²³ Pihak Sultan dan Uleebalang merupakan dua pilar utama yang mendukung kehidupan adat, dan menjadi simbol keberadaan dan peranan adat dalam masyarakat Aceh. Posisi Sultan sebenarnya adalah penyeimbang dua kekuatan antara ulama dan Uleebalang.²⁴

Struktur masyarakat Aceh tersebut berjalan semenjak lahirnya Kerajaan Aceh Darussalam abad ke-15 sampai integrasinya Aceh ke Republik Indonesia. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki identitas kultural yang kuat, serta menjunjung adat mereka yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagai sebuah komunitas, memang Aceh telah memiliki konsep yang mapan yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Keistimewaan Aceh melalui identitas sosial kultural dan religi yang kuat, layak menjadi sebuah kekuatan dan kelebihan rakyat Aceh di antara kemajemukan etnis di Indonesia. Identitas sosio-kultural yang begitu kuat inilah yang menyebabkan masyarakat Aceh menuntut diterapkannya identitas

²³ Sihbudi. *Bara dalam Sekam*. Bandung: Mizan, 2001, hlm. 54.

²⁴ Nazaruddin Syamsuddin. *Revolusi di Serambi Mekkah*. Jakarta: UI-Press, 1999, hlm. 1.

keislaman Aceh dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberontakan Daud Beureuh pada tahun 1950-an salah satunya disebabkan oleh tuntutan untuk menerapkan identitas keislaman masyarakat Aceh.²⁵

Struktur masyarakat Aceh yang saat ini sebagian masih berjalan ialah Mukim dan Gampong. Sedangkan yang lainnya secara formal sudah hilang. Proses perubahan sosial dalam masyarakat Aceh berlangsung lama yaitu dimulai dengan ekspansi bangsa Portugis, Belanda, Jepang, dan perang saudara sampai pada integrasinya Aceh dalam negara kesatuan Indonesia.²⁶

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berada di pintu gerbang masuk wilayah Indonesia bagian barat. Pada saat itu Aceh dijadikan persinggahan kapal-kapal dari berbagai bangsa sekaligus merupakan titik awal terjadinya kontak budaya dari bangsa-bangsa yang pernah singgah di Aceh. Masyarakat Aceh pada saat itu bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu sejak abad ke-16, merupakan produsen lada. Puncaknya pada periode 1800-1870 ketika kesultanan Aceh menjadi pemasok sekitar separuh dari total persediaan lada dunia dan terbukalah hubungan dagang yang kuat dengan Turki, India, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Italia.²⁷

²⁵ Syamsul Hadi. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 48.

²⁶ Abdul Rani Usman, *op.cit.*, hlm. 51

²⁷ Reid, Anthony. *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001, hlm. 336.

Pada masa itu negara–negara yang memiliki hubungan dagang dengan Aceh juga memiliki hubungan diplomatik. Sejak sekitar tahun 1850, perdagangan Aceh banyak dilakukan melalui Penang. Akibatnya, terbangun persepsi dalam masyarakat Aceh bahwa penguasa Inggris lebih menguntungkan mereka, ketimbang masyarakat Belanda. Pada kurun abad ke-19, wajar bagi Kesultanan Aceh untuk menandatangani perjanjian pertahanan bersama dengan Inggris pada tahun 1819, atau cenderung ke arah tersebut, terutama setelah serangan Belanda pada tahun 1973. Hal tersebut terjadi karena Aceh lebih bersahabat dengan Inggris dan tidak menyukai Belanda. Ketika Kesultanan Aceh menyadari bahwa Inggris tidak akan memberikan perlindungan yang dijanjikan terhadap ancaman Belanda, Aceh berupaya mengadakan perjanjian pertahanan bersama Amerika pada tahun 1873.²⁸

Sejak tahun 1898 di daerah Aceh Timur mulai dibuka kesempatan bagi penanaman modal swasta di bidang pertambangan minyak bumi dan perkebunan besar. Usaha perkebunan tembakau telah dicoba pada beberapa daerah konsensi sekitar Tamiang, tetapi usaha ini mengalami kegagalan karena tanahnya tidak cocok untuk tanaman tersebut. Pada tahun 1905, dengan modal perusahaan Belgia, tanaman tersebut diganti dengan tanaman karet. Melihat kenyataan bahwa tanah di Aceh Timur amat cocok untuk perkebunan karet, sejak tahun

²⁸ Ikrar Nusa Bhakti. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 8-9.

1907 Pemerintah Hindia Belanda membuka kebun karet di sekitar Langsa. Usaha ini pun segera diikuti oleh perusahaan-perusahaan swasta lainnya.²⁹

Usaha penanaman modal swasta di Aceh Timur dalam bidang perkebunan karet dan kelapa sawit menjadikan wilayah ini berubah menjadi pusat perkebunan besar di Aceh. Keadaan serupa juga terjadi dalam sektor pertambangan minyak bumi. Khusus di bidang perekonomian rakyat, beberapa upaya perbaikan dijalankan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Diantaranya ialah pembangunan irigasi dan memperkenalkan tenaga penyuluh pertanian.³⁰ Usaha-usaha ini membawa hasil dalam perbaikan ekonomi rakyat.

Setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Pada bidang sosial ekonomi masyarakat, merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Pendudukan Jepang berakhir dengan meninggalkan masyarakat Indonesia dalam kemiskinan. Hal ini terjadi akibat tekanan-tekanan dan pemerasan yang dilakukan Jepang selama menjajah Indonesia. Jepang tidak memberikan kesempatan pada rakyat Indonesia untuk bekerja dengan leluasa. Sebagian besar rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja pada proyek-proyek bangunan Jepang, sehingga banyak lapangan produksi, areal pertanian, dan perkebunan yang ditinggalkan. Kemiskinan rakyat yang

²⁹ Muhammad Gade Ismail, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 20.

³⁰ *Ibid*, hlm. 20.

ditinggalkan Jepang ini ditambah pula dengan kembalinya para tawanan dan bekas romusa ke kota-kota tanpa pekerjaan.³¹

Saat berada ditengah krisis pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam tak patah semangat bahkan Aceh menjadi daerah modal bagi Indonesia pada saat itu. Semasa Agresi Militer Belanda I dan II, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang tidak dikuasai oleh Belanda.³² Pengorbanan Aceh tidak saja dalam bentuk pertahanan, bahkan juga dalam bentuk keuangan, peralatan, dan perobatan. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berakibat kepada kerugian besar di pihak Indonesia sehingga meninggalkan hutang sebesar hampir USS 1,130 juta dari Pemerintah Hindia Timur.³³ Untuk membayar hutang itu, sekaligus untuk mengurangi beban keuangan pemerintah, maka pemerintah harus mampu merampingkan sistem pemerintahannya seefisien mungkin agar pengeluaran dapat lebih ditekan.

Ketika Yogyakarta menjadi ibukota negara, pemerintah Indonesia sudah tidak mampu membiayai pemerintahannya lagi, maka rakyat Aceh memberikan bantuan berupa keuangan, peralatan, dan obat-obatan. Oleh karena itu, Soekarno berulang kali mengagumi perjuangan rakyat Aceh, sebagaimana dalam setiap pidatonya didepan masyarakat Aceh. Beliau menyatakan Aceh adalah “Daerah

³¹ *Ibid.*, hlm. 225.

³² Syamsuddin Haris, (dkk). *Indonesia di Ambang Perpecahan?*. Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 39.

³³ Ruslan, (dkk). *Mengapa Mereka Memberontak? Dedengkot Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008, hlm. 90.

Modal” bagi Republik Indonesia, benteng perjuangan, dan pelopor perjuangan kemerdekaan Indonesia.³⁴

Pernyataan Soekarno beralasan, karena Aceh dijadikan simbol bahwa Indonesia tidak dapat diduduki oleh Belanda sepenuhnya. Aceh dijadikan bukti bahwa masih ada wilayah Republik Indonesia yang tetap bebas untuk memberi fakta kepada dunia internasional, terutama didalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dari proses ini Aceh bergabung menjadi wilayah Republik Indonesia. Lebih lanjut Soekarno menyatakan bahwa rakyat Aceh adalah contoh kepada perjuangan kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dan menjadi tumpuan perhatian rakyat disamping juga menjadi obor perjuangan rakyat Indonesia.³⁵

Tidak hanya itu saja, saat itu Soekarno mengundang tokoh-tokoh pejuang dan pengusaha Aceh untuk memberikan dukungan moral maupun materiil dan mengharapkan dapat mengumpulkan sejumlah dana untuk dapat membeli sebuah pesawat terbang.³⁶ Orang akan terharu apabila mendengar kisah pengumpulan dana untuk pembelian dua buah pesawat terbang tersebut.³⁷ Ketika pemerintah meminta sumbangan kepada rakyat Aceh dalam jumlah yang besar, dengan penuh rasa tanggungjawab mereka menyanggupi permintaan tersebut

³⁴ Abdullah Sani Usman. *Krisis Legitimasi Politik dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh*. Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010, hlm. 191.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 191.

³⁶ Surat undangan perjamuan GASIDA untuk Presiden Soekarno dapat dilihat pada Lampiran 3, hlm 100.

³⁷ Foto Pesawat Seulawah dapat dilihat pada Lampiran 4, hlm. 101.

padahal kondisi rakyat Aceh serba kekurangan dan hartanya telah habis karena penjajahan Belanda dan Jepang.

Melalui pengaruh Teungku Daud Beureueh³⁸ yang saat itu menjabat sebagai pemimpin di Aceh Langkat dan tanah Karo, beliau memanggil para saudagar dan pemimpin Aceh lainnya untuk bermusyawarah membicarakan masalah permintaan Soekarno. Pada waktu itu para saudagar Aceh yang tergabung dalam Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA)³⁹, dalam tempo yang singkat dapat mengumpulkan dana yang besar yaitu uang \$120,000 dan 20 kg emas untuk membeli dua buah pesawat terbang.⁴⁰

Masyarakat Aceh pada saat itu hidup di bawah garis kemiskinan, namun dengan optimis rakyat Aceh mengumpulkan sedikit demi sedikit perhiasan dan emas untuk disumbangkan ke pemerintah Indonesia. Dokumen pembelian pesawat tersebut berasal dari sumbangan para pengusaha, sumbangan emas kawin dan perhiasan para wanita-wanita desa serta zakat-zakat yang seharusnya diterima oleh fakir miskin. Untuk memenuhi harapan Presiden Soekarno dalam kesempatan berkunjung ke Banda Aceh pada tahun 1948, akhirnya rakyat Aceh mampu membeli dua buah pesawat Seulawah RI 001 dan Seulawah RI 002.⁴¹

³⁸ Foto Daud Beureueh dapat dilihat pada Lampiran 5, hlm. 102.

³⁹ Foto penyerahan cek untuk pembelian pesawat Seulawah oleh GASIDA kepada Presiden Soekarno dapat dilihat pada Lampiran 6, hlm. 103.

⁴⁰ Abdul Sani Usman, *op.cit.*, hlm. 192.

⁴¹ Al-Chaidar. *Aceh Bersimbah Darah: Pengungkapan Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 12.

Soekarno memberi nama kedua pesawat ini dengan nama Seulawah yang berarti “gunung emas” sebagai penghargaan atas pengorbanan rakyat Aceh. Seulawah yang menjadi cikal bakal Garuda Indonesia Airways tidak hanya menjadi instrumen paling penting dalam memberikan modal bagi upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan pesawat Seulawah inilah, Indonesia mampu menembus blokade tentara pendudukan kolonial dan mampu membawa tokoh Indonesia ke luar negeri untuk memperkenalkan Indonesia di kancah dunia internasional.⁴² Pesawat Seulawah juga pernah digunakan Bung Hatta untuk mengelilingi Sumatra, Yogyakarta, Payakumbuh, Jambi, dan Banda Aceh.⁴³

Sebagian dari dana tersebut masih dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan duta-duta dan kantor perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri, diantaranya Singapura, Penang, India, Manila, perwakilan di PBB dan biaya duta keliling H. Agus Salim ke Timur Tengah serta biaya konferensi Asia di New Delhi, India.⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kontribusi rakyat Aceh pada Republik Indonesia sudah sangat banyak.

Pada masa Orde Baru kebijakan pemerintah ditekankan pada pembangunan dengan didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Aset-aset sumber daya alam di Aceh dieksploitasi dalam konteks

⁴² Ruslan, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 91.

⁴³ Foto Bung Hatta bersama pesawat Seulawah dapat dilihat pada Lampiran 7, hlm. 104.

⁴⁴ Abdullah Sani Usman, *loc.cit.*

pembangunan. Saat ditemukannya sumber gas alam cair pada tahun 1969 di kampung Arun, maka pada 1971 dimulailah pembangunan kilang gas alam. Pabrik *Light Natural Gas* (LNG) dan Pupuk Islandar Muda yang dibangun tersebut maju dengan pesat. Bahkan Indonesia menjadi salah satu eksportir LNG terbesar dan 90% dari produksi pupuk ditujukan bagi ekspor.⁴⁵ Karena kontrol terhadap semua *output* dikuasai oleh rezim orde baru, kebijakan industri dan ekonomi Aceh menjadi terkonsentrasi pada otoritas pemerintahan pusat Indonesia.⁴⁶ Pembangunan di Aceh tidak mengalami kemajuan yang signifikan bila dibandingkan dengan keuntungan pusat yang diperoleh dari wilayah ini.

Masyarakat Aceh tidak hanya merasakan kerimbangan kekuatan pusat dan daerah yang tidak adil, tetapi juga ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok pendatang yang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki Aceh dengan masyarakat Aceh itu sendiri. Jumlah masyarakat Aceh yang hidup dalam kemiskinan masih banyak, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedesaan di Aceh bagian utara. Masyarakat mulai menyadari bahwa hasil tambang gas dan minyak sebenarnya bisa membawa kemakmuran tapi tidak pernah digunakan

⁴⁵ Produksi gas alam ini berdasarkan data tahun 1998, dihasilkan devisa US\$ 2,6 milyar per tahun, atau sama dengan Rp. 316 triliun sesuai dengan nilai rupiah pada tahun 1997. Devisa ini masih ditambah dengan hasil dari industri hilir dan dan hasil kekayaan hutan Aceh yang luasnya lebih dari 4 juta hektar. Kekayaan hutan yang diolah oleh perusahaan HPH menghasilkan Rp.900 miliar per tahun, sedangkan PAD Aceh dari sektor hutan ini hanya Rp. 45 miliar atau sebesar 0,5%. Lihat Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 10.

⁴⁶ Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 50.

untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Aceh.⁴⁷ Kemakmuran justru dibawa ke Jakarta, sementara sekelompok kecil elit Aceh menjadi begitu makmur, maka semua itu membawa masyarakat Aceh pada perasaan kecewa.

C. Situasi Politik Aceh

Nanggroe Aceh Darussalam sekarang ini merupakan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam. Perbedaan besar antara keduanya adalah Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah negara yang berdaulat yang mempraktikkan hukum Islam didalamnya. Kerajaan Aceh Darussalam mempunyai hubungan baik dengan beberapa negara di Eropa, Asia, dan Arab. Kerajaan Aceh Darussalam berkembang pesat sehingga dapat menguasai beberapa wilayah terdekat. Wilayah Kerajaan Aceh Darussalam melingkupi setengah dari pulau Sumatra, semenanjung Malaya, dan terkenal diseluruh dunia.⁴⁸

Kerajaan Aceh Darussalam terkenal dengan ketangguhan militer dan rakyatnya makmur, oleh karena itu Kerajaan Aceh Darussalam kedudukannya sama dengan kerajaan lain di dunia seperti Kerajaan Inggris, Kerajaan Belanda, dan Kerajaan Turki di Istanbul. Demikian juga struktur pemerintahannya yang sempurna sehingga sistem pemerintahan yang dijalankannya berlangsung

⁴⁷ *Ibid.*, hlm 51.

⁴⁸ Hasanuddin Yusuf Adan, *op.cit.*, hlm. 28.

sebagaimana yang diharapkan. Realitas tersebut dapat dilihat dari perannya di selat Malaka serta dalam menjalin persahabatan serta hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya di dunia.⁴⁹ Sementara Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah provinsi Indonesia yang semua hukum dan ketentuannya didatangkan dari Jakarta. Wilayahnya pun kecil bila dibandingkan dengan Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu dari Sabang di sebelah barat sampai ke Kuala Simpang di sebelah timur.⁵⁰

Meskipun Kerajaan Aceh sudah mulai melemah pada awal abad ke-19, pemerintah Inggris pernah berkuasa di Nusantara pada tahun 1815-1821, masih tetap mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Kerajaan Aceh. Hal itu terlihat dalam Perjanjian London (1824) dimana Belanda menerima kembali seluruh kekuasaannya di Nusantara, kecuali Aceh yang harus dihormati kemerdekaan dan kedaulatannya oleh Belanda. Dalam perkembangannya kemudian, ternyata Belanda tetap berkeinginan untuk menguasai Aceh, yang diawali upaya dengan membujuk Inggris mengganti Perjanjian London yang bersyarat itu dengan Perjanjian Sumatra pada tahun 1871 yang tanpa syarat lagi. Dua tahun kemudian pecalah Perang Aceh (1873-1914), yang merupakan perang terlama yang dilakukan oleh pemimpin lokal diseluruh Nusantara dalam menghadapi Pemerintah Kolonial Belanda.⁵¹

⁴⁹ Abdul Rani Usman, *op.cit.*, hlm 50.

⁵⁰ Hasanuddin Yusuf Adan, *loc.cit.*

⁵¹ Syamsuddin Haris, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 38.

Kondisi Kerajaan Aceh Darussalam berbeda dengan penguasa disekitar Laut Jawa yang cenderung terpaksa dengan Belanda. Dengan kata lain, ketika banyak daerah lain di Indonesia pada kenyataannya lebih banyak bekerja sama dari pada berhadapan dengan Belanda, Aceh melakukan sebaliknya. Perang Aceh melawan Belanda selama kurun waktu 1873-1914 menimbulkan korban sebesar 100.000 orang rakyat Aceh meninggal dan korban dari pihak Belanda sebesar 16.000 jiwa.⁵²

Dalam sejarah politik Indonesia, Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang paling pendek mengalami masa penjajahan Belanda, yaitu sejak berakhirnya Perang Aceh sampai kedatangan Bala Tentara Jepang pada tahun 1943. Sampai tahun 1918, pemerintah Kolonial Belanda belum berhasil membentuk pemerintahan sipil seperti di daerah lainnya.⁵³

⁵² Perang melawan Belanda yang memakan waktu 40 tahun lamanya (1873-1914) merupakan perang yang terlama dalam sejarah kolonialisme Belanda dan menimbulkan kerugian yang besar bagi kedua pihak. Perang melawan Belanda ini menciptakan sejumlah besar *Hikayat Perang Sabil* yang dapat mengobarkan semangat melawan Belanda sehingga orang rela mati syahid. Belanda menganggap *Hikayat* ini amat berbahaya, sehingga dilakukan upaya untuk mencari dan memusnahkannya. Perang ini juga melahirkan sejumlah pahlawan-pahlawan, antara lain Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Teungku Cik Di Tiro Muhammad Saman, Teuku Panglima Polem Mahmud Arifin, dan Teuku Umar. Lihat Teungku Ibrahim Alfian. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1999, hlm. 211.

⁵³ Nazaruddin Syamsuddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafiti, 1990, hlm. 17.

Dalam masa penjajahan Belanda yang pendek itulah Belanda menjalankan *Politik Devide et Impera*⁵⁴ dengan memanfaatkan kelompok bangsawan (Uleebalang) dalam menghadapi perlawanan yang masih terus dilakukan oleh para ulama yang kemudian tergabung Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpin oleh Teungku Daud Beureuh sejak tahun 1936.⁵⁵ Masuknya Uleebalang dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda menyebabkan keseimbangan kekuasaan antara Uleebalang dan ulama menjadi goyah.

Cara Belanda ini dianggap salah satu faktor yang menyebabkan lunturnya keseimbangan dua kekuasaan besar di Aceh, antara kekuasaan Uleebalang dan ulama yang diseimbangkan oleh kekuasaan Sultan. Hilangnya penyeimbang kekuasaan dalam struktur sosial di Aceh ini menyebabkan, timbulnya pergesekan dan konflik yang berkepanjangan antara ulama dan Uleebalang.⁵⁶

Dengan posisi seperti itu, ulama tidak mungkin mendapat kedudukan di masa pemerintahan Hindia Belanda. Demikian pula pada masa Jepang yang

⁵⁴ *Devide et Impera* atau politik pecah belah adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Lihat www.serbasejarah.com di akses pada tanggal 26 November pukul 19.18 WIB.

⁵⁵ Syamsuddin Haris, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 39.

⁵⁶ Nazaruddin Syamsuddin, *op.cit.*, hlm. 4.

mengikuti cara Belanda, yakni dengan memilih bekerja sama dengan Uleebalang ketimbang dengan ulama. Disharmoni antara ulama dan Uleebalang sejak masa Belanda dan Jepang tersebut, menjadi masalah bom waktu.⁵⁷ Jika di era kolonial Belanda di Aceh terjadi perlawanan yang gigih melawan Belanda, pada masa kemerdekaan setelah adanya pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat Jakarta terjadi perang saudara sesama masyarakat Aceh.

Sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, elit politik dan masyarakat Aceh terbelah menjadi dua. Kelompok pertama dipimpin oleh Teuku Nyak Arif⁵⁸ yang menjabat sebagai Gubernur pertama Aceh yang mendukung pemerintahan Soekarno-Hatta di Jakarta, sedangkan kelompok yang kedua dipimpin oleh pemimpin lokal Teuku Muhammad Daud Cumbok yang menginginkan Aceh menjadi negara merdeka. Pertikaian antara kedua kelompok ini yang menimbulkan perang saudara yang dikenal dengan Perang Cumbok pada tahun 1945-1946.⁵⁹

Tokoh perang Cumbok adalah Teuku Muhammad Daud Cumbok⁶⁰. Pada 15 September 1945, Daud Cumbok mengirim utusan kepada para pejabat

⁵⁷ Moch. Nurhasim. *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 60.

⁵⁸ Foto Teuku Nyak Arif dapat dilihat pada Lampiran 8, hlm. 105.

⁵⁹ Neta S. Pane. *Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan dan Impian*. Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 3-4.

⁶⁰ Teuku Muhammad Daud Cumbok adalah salah satu keturunan Uleebalang yang radikal terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Daud Cumbok seorang lelaki yang berwatak keras, yang selalu dengan tegas melarang para pemuda Aceh mengibarkan bendera Merah Putih. Lihat *Ibid.*, hlm 3.

yang sedang ditahan Jepang di Rantauprapat, Sumatra Utara agar segera masuk ke Aceh. Namun, perjuangan Daud Cumbok yang menentang kemerdekaan RI di Aceh itu kandas di tengah jalan. Sebab, para pejuang kemerdekaan RI di Aceh yang dipimpin Sjamaun Gaharu melakukan penyerbuan ke markas Daud Cumbok. Dalam sejarah Aceh peristiwa ini dikenal sebagai Peristiwa Cumbok. Sejumlah tokoh Aceh menilai sebenarnya Perang Cumbok adalah perang antara ulama dengan kalangan Uleebalang. Kedua kelompok masyarakat ini sejak zaman penjajahan Belanda selalu berseberangan. Kalangan hulubalang ini dinilai selalu mengkhianati perjuangan ulama bersama para pejuang Aceh dalam menentang intimidasi penjajah Belanda. Latar belakang ini membuat perang Cumbok berkobar menjadi perang besar, yang oleh sebagian tokoh Aceh disebut sebagai Perang Saudara terbesar sepanjang sejarah Aceh.

Rakyat dan pemimpin Aceh sudah letih dengan peperangan yang berkepanjangan. Kabar kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan Soekarno dan Hatta sampai pula ke Aceh. Kabar tersebut disambut rakyat Aceh dengan gegap gempita. Rakyat Aceh mengira bahwa dengan adanya kemerdekaan Indonesia, mereka bisa mewujudkan diberlakukannya syariat Islam di tanah rencong. Perjuangan ternyata belum selesai, Belanda ternyata kembali melancarkan agresi kedua. Seluruh wilayah Indonesia sudah dikuasai Belanda kecuali Aceh. Rakyat Aceh ikut mempertahankan Pangkalan Brandan di Sumatra Utara.⁶¹

⁶¹ Ruslan, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 85.

Mereka berjuang mati-matian dengan mengorbankan harta benda bahkan jiwa untuk mencegah rencana Belanda yang ingin menduduki kembali wilayah Aceh. Tinta emas sejarah tidak bisa mengingkari pengorbanan rakyat Aceh dalam berjibaku mengorbankan tetesan darah untuk kejayaan ibu pertiwi. Jika saat itu Daud Beureuh dan ulama lainnya ingin memerdekakan Aceh, bukan merupakan hal yang sulit.

Aceh adalah satu-satunya wilayah di Indonesia yang kondisi masyarakatnya stabil di saat daerah lain belum menemukan jati dirinya. Aceh adalah satu-satunya wilayah yang tegak kokoh diatas kakinya sendiri, ketika daerah lainnya tunduk dan takluk dalam kekuasaan Belanda. Akan tetapi Aceh justru semakin memantapkan langkahnya untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Sebagai Gubernur Militer, Daud Beureuh justru meneguhkan Indonesia dengan mendeklarasikan terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tanggal 1 Juni 1948.⁶²

Rasa nasionalisme rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia sangat tinggi. Empat bulan sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan Cut Nyak Arief dan M. Husni Thamrin, utusan dari Aceh pada sidang di Volksraad kedelapan, menyatakan bangga menggunakan kata "*Indonesia*". Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme telah merambah ke Tanah Rencong. Selain itu, Tengku Daud Beureueh menerima undangan untuk mengikuti konferensi untuk mendirikan negara baru. Konferensi yang diprakarsai Wali Negara Sumatra

⁶² *Ibid.*, hlm. 86.

Timur, dr. Tengku Mansyur, diadakan pada 28 Maret 1949.⁶³ Surat tersebut dijawab Daud Beureueh bahwa di Aceh tidak ada maksud membentuk suatu Aceh Raya atau negara merdeka, karena orang Aceh telah sangat bersemangat membentuk Republik Indonesia. Maka undangan dari Wali Negara Sumatra Timur dianggap tidak pernah ada dan juga tidak dihadiri.

Kedatangan Presiden Soekarno ke Aceh untuk pertama kalinya pada 15 Juni 1948, menggunakan Pesawat Dakota sewaan di Lapangan Terbang Lhok Nga disaksikan ribuan rakyat Aceh. Saat itu, Republik sedang mengalami masalah yang genting. Satu tahun sebelumnya, Indonesia diguncang Agresi Belanda dan mayoritas wilayah telah diduduki. Kondisi di Aceh sepenuhnya berbeda, Daud Beureuh yang menjabat sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo mampu mengendalikan situasi. Keadaan Aceh relatif aman dan tertib. Pemerintahan lokal di sana bahkan mampu melakukan hubungan dagang dengan luar negeri.

Pertemuan resmi Soekarno dengan ulama Aceh dilaksanakan di pendopo Karesidenan.⁶⁴ Pada kesempatan tersebut, Soekarno meminta kepada Daud Beureuh agar Aceh mempertahankan RI hingga titik darah penghabisan. Tidak hanya itu, Soekarno meminta bantuan moril dan materiil kepada rakyat Aceh yang jumlahnya tidak hanya sedikit. Pesawat Seulawah yang dikenal sebagai RI

⁶³ Fikar Eda, (dkk). *Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 19.

⁶⁴ Foto tempat pertemuan Presiden Soekarno dengan GASIDA dapat dilihat pada Lampiran 9, hlm. 106.

001 dan 002 menjadi prasasti nyata dukungan rakyat Aceh kepada pemerintah. Apalagi jika mengingat janji Soekarno, saat pertama kali berkunjung pada tanggal 15 Juni 1948, Presiden Soekarno atas nama Allah sempat bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam.⁶⁵

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno, rakyat Aceh mulai mempertanyakan kesungguhan Soekarno untuk menepati janjinya. Alasan Soekarno tidak memberikan Aceh kebebasan dalam menjalankan syariat Islam dalam semua segi kehidupan karena takut daerah lain di Indonesia juga akan menuntut hal yang sama. Status provinsi dan otonomi yang telah dikukuhkan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada bulan Desember 1949 mulai digugat. Persoalannya terletak dengan adanya penataan baru status provinsi di seluruh wilayah RI. Titik kekecewaan Daud Beureuh adalah ketika sidang Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 8 Agustus 1950 di Jakarta memutuskan wilayah Indonesia dibagi ke dalam 10 daerah tingkat I (provinsi), dimana provinsi Aceh dileburkan ke dalam pemerintahan Provinsi Sumatra Utara yang mayoritas beragama Kristen.

Padahal, berdasarkan Ketetapan Pemerintah Darurat RI No. 8/Des/WKPH tertanggal 17 Desember 1949 yang ditandatangani Syafruddin Prawiranegara di Banda Aceh telah dibentuk Provinsi Aceh dengan Teungku

⁶⁵ Ruslan (dkk)., *op. cit*, hlm. 87.

Daud Beureuh sebagai Gubernur Militer.⁶⁶ Ternyata oleh Dewan Menteri RIS, pembentukan Aceh dianggap tidak sah. Lalu, pada tanggal 23 Januari 1951, Perdana Menteri M. Natsir di depan podium Radio Republik Indonesia (RRI) di Banda Aceh membacakan surat keputusan tentang pembubaran Provinsi Aceh. Rakyat Aceh meresa dikhianati habis-habisan oleh pemerintah. Kepedihan dan kemarahan rakyat Aceh tergambar jelas dalam Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan pada tanggal 11-15 April 1953.

Pada saat kongres tersebut, pemimpin Aceh mengutarakan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Hasilnya setelah kongres tersebut pemimpin Aceh mendukung berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dan mensosialisasikan keputusan itu kepada masyarakat. Pada 21 September 1953 Teungku Daud Beureuh mendeklarasikan dukungannya terhadap gerakan NII yang pertama kali diproklamasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat pada tanggal 7 Agustus 1949. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).⁶⁷ Pemberontakan ini dapat diakhiri pada tanggal 26 Mei 1959 ketika Aceh diberikan status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, terutama dalam bidang agama, adat, dan pendidikan, yang kemudian diformalkan melalui UU No. 18 tahun 1965.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 91.

⁶⁷ Ikrar Nusa Bakti, *op.cit.*, hlm. 12.

⁶⁸ Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 47.

Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto melanjutkan kebijakan pendahulunya untuk memberikan Aceh status Daerah Istimewa dan penerapan Syariah Islam, akan tetapi janji tersebut tidak pernah dilaksanakan sepenuhnya. Di lain pihak Presiden Soeharto memberikan kesempatan kepada perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh di bidang eksplorasi minyak dan gas di Arun 1970-an.⁶⁹

Pemberontakan di Aceh kembali muncul dengan nama baru Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Walaupun gerakan ini baru didirikan pada tanggal 20 Mei 1977, Hasan Tiro memilih hari lahir GAM pada tanggal 4 Desember 1976. Sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Aceh Sumatra. Kalau dahulu Daud Beureuh dan Darul Islam hanya berupaya mendirikan Negara Islam Indonesia tanpa ada keinginan memisahkan diri dari RI, GAM bercita-cita mendirikan negara merdeka dan terpisah dari RI.⁷⁰

⁶⁹ Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 18.

⁷⁰ Syamsul Hadi, *op.cit.*, hlm. 13.